



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gambut Tahun 2023

Kode Organisasi : 4.01.15.00

Nama SKPD : KECAMATAN GAMBUT



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gambut Tahun 2023

Kode Organisasi	: 4.01.15.00
Nama SKPD	: KECAMATAN GAMBUT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2023 ini adalah merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2021 - 2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Gambut sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Gambut, 31 Januari 2024
Camat Gambut

Ahmad Fauzan, S.STP, M.Si.
NIP. 19801125 200012 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ...	4
D. Isu Strategis.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Indikator Kinerja Utama	8
B. Perjanjian Kinerja.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran	25
C. Realisasi Anggaran	29
D. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2022..	45
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-Saran	49
LAMPIRAN	51

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 2021 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap sasaran strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Berhasil** dengan capaian kinerja **77,36 (105,97%)**.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun

hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Gambut berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Gambut adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	Rp. 6.878.307.434,00	100%

Laporan Realiasi Anggaran Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
BELANJA DAERAH	6.878.307.434	6.407.828.686	93,16	4.660.506.398
BELANJA OPERASI	6.233.604.434	5.766.103.983	92,50	4.605.844.148
belanja Pegawai	3.684.991.860	3.308.407.569	89,78	3.529.887.694
Belanja Barang dan Jasa	2.548.612.574	2.457.696.414	96,43	1.075.956.454
BELANJA MODAL	644.703.000	641.724.703	99,54	54.662.250
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	226.698.000	224.664.703	99,10	54.662.250
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.000.000	70.155.000	98,67	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	346.905.000	346.905.000	100	0
SURPLUS / DEFISIT	(6.878.307.434)	(6.407.828.686)	0	(4.660.506.398)
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.878.307.434)	(6.407.828.686)	0	(4.660.506.398)

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Gambut
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Gambut
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Gambut kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Gambut
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Gambut

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Permen KL terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gambut
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B.1 KEDUDUKAN:

Kecamatan Gambut merupakan unsur Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 TUGAS:

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 04 Juni 2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

B.3 FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

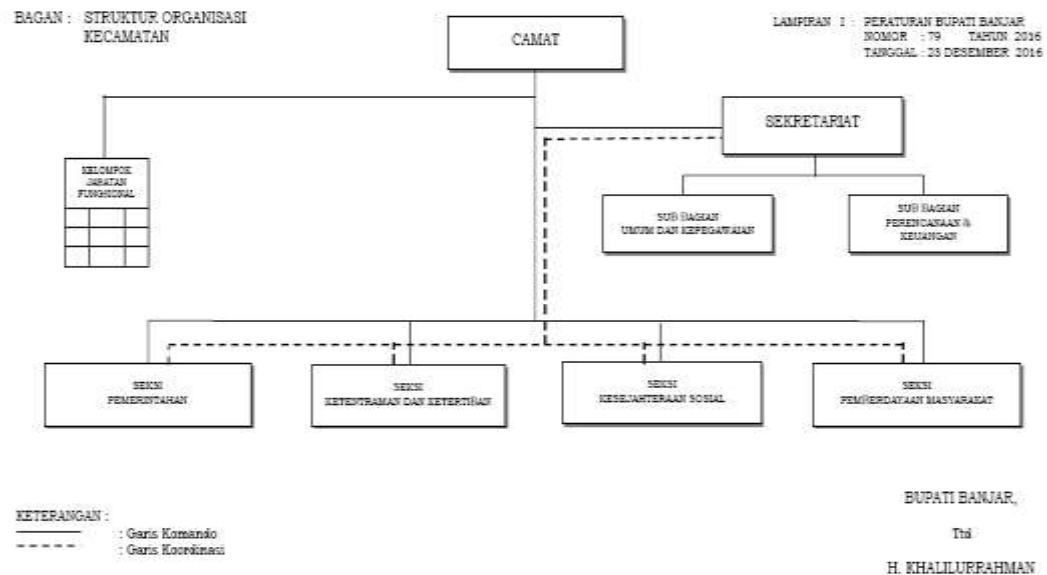
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan.

Susunan Organisasi Kecamatan Gambut terdiri dari:

Susunan organisasi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 1.1. Bagan SOTK Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Kecamatan Gambut yang membantu Kepala Daerah dalam Urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra Perubahan dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Gambut masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel I

Tabel Permasalahan pada Kecamatan Gambut

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan desa / kelurahan di kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan di kecamatan
		Pengoptimalan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan umum kecamatan.
			Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan
		Pengoptimalan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan atas trantibumlinmas di kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan koordinasi trantibumlinmas di kecamatan
		Pengoptimalan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan data penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan peraturan perundangan.
			Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra Kec.Gambut Thn.2021-2026

D. ISU STRATEGIS

Kecamatan Gambut secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Gambut sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Gambut adalah Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gambut Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR;

DAFTAR ISI;

RINGKASAN EKSEKUTIF;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2023 dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 beserta analisisnya

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Gambut mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Gambut mendukung pencapaian misi keempat Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah”

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gambut Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik / Sangat Tinggi)	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

Sumber : Surat Keputusan IKU Kecamatan Gambut Tahun 2023

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2023 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	73	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	Nilai	73	4.225.271.434	Camat
				2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persen	100%	70.080.000	
				3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100%	1.229.050.000	
				4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persen	100%	2.450.000	
				5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100%	1.336.580.000	
				6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100%	14.876.000	
Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Nilai	73		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	Nilai	73	4.225.271.434	Sekretaris Camat
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	100%		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100%	1.299.600	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100%	3.647.191.860	
Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persen	100%		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persen	100%	27.000.000	

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100%	158.008.000	
Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen	100%	7.200.000	Kasubag Umum dan Kepegawain
Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	147.593.250	
Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Persen	100%	31.536.000	
Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Persen	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	205.442.724	
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan	Persen	100%		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	Persen	100%	29.840.000	Kasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Persen	100%		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	Persen	100%	40.240.000	Kasi Pemerintahan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100%		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100%	1.336.580.000	
Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100%		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100%	14.876.000	
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100%		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Persen	100%	79.050.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Gambut)	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut)	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100%	600.000.000	Lurah Gambut
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Gambut Barat)	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100%	550.000.000	Lurah Gambut Barat
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100%		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100%	2.450.000	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Thn 2023 Kecamatan Gambut

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100\%$$

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Gambut Kab. Banjar tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim

pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\leq 100\%$	Berhasil	Hijau
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil	Kuning
4	$< 40\%$	Tidak Berhasil	Merah

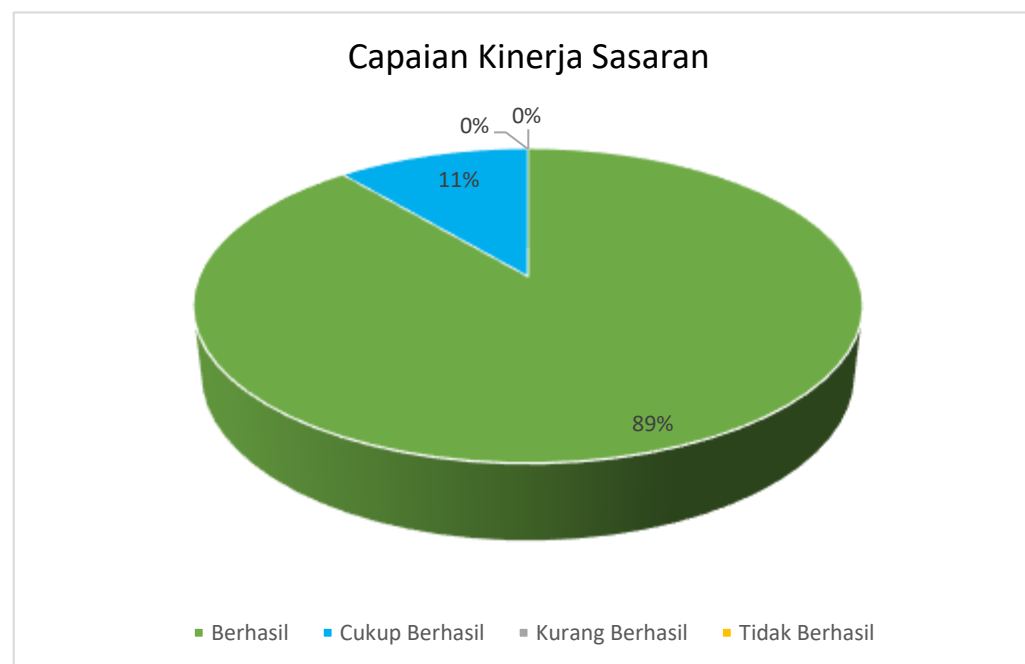
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR	TAHUN 2023		REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
			SATUAN	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai	73	77,36	105,97	Berhasil
Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	(Total dari nilai persepsi per unsur /total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai	73	73,24	100,57	Berhasil
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Realisasi / Rencana X 100%	Persen	100%	100%	100	Berhasil
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	100%	91%	91	Cukup Berhasil
Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun		Persen	100%	100%	100	Berhasil
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan		Persen	100%	98,03%	98,03	Cukup Berhasil
Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Realisasi / Rencana X 100%	Persen	100%	100%	100	Berhasil
Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	100%	100%	100	Berhasil
Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100%	100%	100	Berhasil
Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi		Persen	100%	100%	100	Berhasil
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan	Realisasi / Rencana X 100%	Persen	100%	100%	100	Berhasil
Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Realisasi / Rencana X 100%	Persen	100%	100%	100	Berhasil
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persen	100%	100%	100	Berhasil
Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persen	100%	100%	100	Berhasil
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Realisasi / Rencana X 100%	Persen	100%	100%	100	Berhasil
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Gambut)	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Realisasi / Rencana X 100%	Persen	100%	100%	100	Berhasil
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Gambut Barat)	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Realisasi / Rencana X 100%	Persen	100%	100%	100	Berhasil

Meningkatnya Penyelenggaraan Umum serta Kecamatan	Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Perlindungan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Realisasi / Rencana X 100%	Persen	100%	100%	100	Berhasil
---	---	--	----------------------------	--------	------	------	-----	----------

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2023



Penjelasan Tabel 3.2 sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang merupakan Sasaran Kecamatan Gambut Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi dengan target 73 dapat terealisasi 77,36 dengan nilai capaian 105,97%, dengan predikat capaian **Berhasil**.
2. Sasaran kinerja Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) target 73 realisasi 73,42 dengan nilai capaian 100,57%, dengan predikat capaian **Berhasil**.
3. Sasaran kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan Indikator Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Berhasil**.
4. Sasaran kinerja Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 91%, dengan predikat capaian **Cukup Berhasil**.
5. Sasaran kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersusun memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Berhasil**.
6. Sasaran kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan memperoleh capaian kinerja sebesar 98,03%, dengan predikat capaian **Cukup Berhasil**.
7. Sasaran kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Berhasil**.

8. Sasaran kinerja Terselenggaranya Kegiatan Kantor dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Berhasil**.
9. Sasaran kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Berhasil**.
10. Sasaran kinerja Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Berhasil**.
11. Sasaran kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indikator Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Berhasil**.
12. Sasaran kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Berhasil**.
13. Sasaran kinerja Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan dengan indikator Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Berhasil**.
14. Sasaran kinerja Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Berhasil**.

15. Sasaran kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Berhasil**.
16. Sasaran kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai ketentuan (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Berhasil**.
17. Sasaran kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai ketentuan (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Berhasil**.
18. Sasaran kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Berhasil**.

A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Kertak Hanyar sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	76,82	77,36
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Nilai	22,60	73,24
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	100%	100%
4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100%	91%
5	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persen	100%	100%
6	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100%	98,03%
7	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen	100%	100%
8	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	100%
9	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	100%
10	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Persen	100%	100%
11	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan	Persen	100%	100%
12	Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Persen	100%	100%
13	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100%	100%
14	Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100%	100%
15	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	85,71%	100%
16	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Gambut)	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100%	100%
17	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Gambut Barat)	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100%	100%
18	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100%	100%

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Gambut 2021-2026

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2021-2026, tahun 2022 dan 2023 Kecamatan Gambut menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan terealisasi pada tahun 2023 sebesar 77,36 dengan target sebesar 73. Nilai tersebut sudah melebihi target tahun 2023 yang sudah ditentukan dibandingkan dengan tahun 2022 capaian indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan terealisasi sebesar 76,82.

2. Capaian kinerja Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 73,42 dengan target 73. Nilai tersebut sudah melebihi target tahun 2023 yang sudah ditentukan dibandingkan dengan tahun 2022 dengan realisasi sebesar 22,60.
3. Realisasi capaian kinerja pada Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2022 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
4. Realisasi capaian kinerja Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2023 memperoleh capaian kinerja sebesar 91% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan capaian kinerja lebih tinggi sebesar 100%.
5. Realisasi capaian kinerja Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersusun tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2022 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
6. Realisasi capaian kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase BMD yang

terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 98,03% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan capaian kinerja lebih tinggi sebesar 100%.

7. Realisasi capaian kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2022 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
8. Realisasi capaian kinerja Terselenggaranya Kegiatan Kantor dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2022 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
9. Realisasi capaian kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2022 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
10. Realisasi capaian kinerja Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2022 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
11. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2022 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
12. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pelayanan publik tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2022 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.

13. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2022 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
14. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2022 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
15. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan capaian kinerja lebih rendah sebesar 85,71%.
16. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Gambut) dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2022 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
17. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100%

sama halnya dengan tahun 2022 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja dengan indikator kinerja Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2022 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.

18. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2022 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2023 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2023 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2023, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Gambut selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2023	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	73	77,36	85	100%

Sumber : Matrik Renstra Perubahan Kecamatan Gambut Thn.2022-2026

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir di atas menunjukkan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Sasaran Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dengan realisasi sebesar 77,36 sudah melebihi target tahun 2023 yakni 73 namun masih belum bisa mencapai target akhir periode renstra yakni 85 di tahun 2026.

A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2022 DAN TARGET NASIONAL

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Nasional. Tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tidak bisa di sandingkan dengan Target Provinsi Dan Nasional seperti tabel di atas mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible mengenai target Provinsi maupun Nasional tersebut.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN,

Pada tahun 2023 berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 terjadi perubahan ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator kinerja kinerja sasaran Nilai Evaluasi Kecamatan.

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan melalui Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan dengan capaian **berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Penanggung jawab
Nilai Evaluasi Kecamatan	73	77,36	105,97	CAMAT
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	73	73,24	100,57	Sekretaris Camat

Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%	100%	100	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	91%	91	
Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100%	100%	100	
Persentase BMD yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	98,03%	98,03	
Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	100%	100%	100	Kasubag Umum dan Kepegawain
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	
Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	
Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	100%	100%	100	
Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan	100%	100%	100	Kasi Kesejahteraan Sosial
Persentase Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan public	100%	100%	100	Kasi Pemerintahan
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	
Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100	
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	100	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	Lurah Gambut
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	Lurah Gambut Barat
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	100	Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2023

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator kinerja sasaran Nilai Evaluasi Kecamatan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 77,36 dengan target 77 dengan capaian 105,97% di bandingkan dengan realisasi tahun 2022 kinerja sasaran Evaluasi Kinerja Kecamatan realisasi sebesar 76,82 dengan target 70 dengan capaian 109.74% maka pada tahun 2023 ini terdapat kenaikan nilai capaian kinerja dan nilai capaian memenuhi target capaian tahun 2023.

Faktor Keberhasilan Sasaran

Faktor keberhasilan tercapainya sasaran renstra Kecamatan Gambut Tahun 2023 adalah :

1. Faktor Internal, Pemenuhan dan pencapaian kinerja baik anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan. Dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2023, maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA/ DPPA SKPD secara konsisten, pemenuhan data dukung yang berkualitas dan sesuai saat dilakukan penjaminan kualitas data dukung oleh tim penilai kabupaten.
2. Faktor Eksternal, Peran penting dari Masyarakat/ desa yang berperan dalam memberikan informasi dan data dukung di saat Kecamatan Gambut melakukan pengumpulan data yang diminta oleh tim penilai kabupaten. Hal ini menjadikan pelaksanaan penilaian Sasaran Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja baik program, kegiatan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian kinerja secara keseluruhan yang harus dilakukan agar bisa mengetahui perkembangan pelaksanaan kinerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan solusi.

Faktor Keberhasilan Sasaran

Sedangkan untuk Faktor penghambat tercapainya sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kurang nya Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Gambut.
2. Kualitas data dukung penilaian yang tidak sesuai kriteria tim penilai.
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, karena masih terdapat pegawai yang belum bisa menguasai komputer.
4. Kurang nya bangunan/ tempat gudang arsip yang menjadi salah satu poin penilaian.
5. Tidak terpasang spanduk / banner yang menunjukkan data aspirasi masyarakat yang telah disepakati pada kegiatan musrenbang Kecamatan Gambut tahun berjalan, dimana ini juga salah satu poin penilaian.
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pencapaian kinerja

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran:

1. Menambah Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
2. Peningkatan wawasan Sumber Daya Manusia.
3. Memenuhi point point dan dukung yang kurang lengkap saat dilakukan penilaian dan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi masih harus sering dilaksanakan guna pencapaian target kinerja.

Upaya perbaikan :

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kinerja ASN. Monitoring dan evaluasi bulanan juga diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan target serta ada kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tindak lanjut yang akan datang :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penambahan sumber daya manusia dan peningkatan wawasan.
2. Memaksimalkan koordinasi pada intern Kecamatan Gambut, sehingga Capaian Kinerja Sasaran Renstra, Program dan Kegiatan bisa dicapai dengan lebih baik lagi.

C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Gambut tahun 2023 adalah sebesar Rp 6.878.307.434,- dengan realisasi anggaran Rp. 6.407.828.686,- (93,16%) dengan rincian untuk Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp. 6.233.604.434,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 5.766.103.983,- (92,50%) dan Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 644.703.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp 641.724.703,00,- (99,54%).

Tabel 3.6 Realiasi Jenis Belanja

No.	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)
1	BELANJA DAERAH	Rp. 6.878.307.434	Rp. 6.407.828.686	93,16
2	BELANJA OPERASI	Rp. 6.233.604.434	Rp. 5.766.103.983	92,50
3	BELANJA MODAL	Rp. 644.703.000	Rp. 641.724.703	99,54

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Gambut Tahun 2023

Adapun untuk realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut

Tabel 3.7 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERAENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.225.271.434	Rp. 3.825.338.201	90,53%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.299.600	Rp. 1.299.600	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 499.800	Rp. 499.800	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 349.000	Rp. 349.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 450.000	Rp. 450.000	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.647.191.860	Rp. 3.270.907.569	89,68%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.598.051.860	Rp. 3.221.767.569	89,54%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 49.140.000	Rp. 49.140.000	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 7.200,00	Rp. 7.200,00	100%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	100%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 147.593.250	Rp. 143.461.147	97,2%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.495.000	Rp. 1.495.000	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 1.495.500	Rp. 1.495.500	100%
	Penyediaan Bahan Logistik	Rp. 25.073.750	Rp. 23.650.000	94,32%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.124.000	Rp. 1.958.500	92,21%
	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 1.995.000	Rp. 1.995.000	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 115.410.000	Rp. 112.867.147	97,8%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 31.536.000	Rp. 31.375.000	99,49%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 31.536.000	Rp. 31.375.000	99,49%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 205.442.724	Rp. 196.331.385	95,56%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.400.000	Rp. 4.400.000	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 53.502.724	Rp. 46.374.545	86,68%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 147.500.000	Rp. 145.516.840	98,66%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 158.008.000	Rp. 147.938.100	93,63%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 55.770.000	Rp. 54.526.600	97,77%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 17.950.000	Rp. 10.368.500	57,76%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 84.268.000	Rp. 83.043.000	98,52%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 70.080.000	Rp. 58.996.000	84,18%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 29.840.000	Rp. 29.840.000	100%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 29.840.000	Rp. 29.840.000	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 40.240.000	Rp. 29.156.000	72,46%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 40.240.000	Rp. 29.156.000	72,46%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 1.229.050.000	Rp. 1.198.972.485	97,55%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 79.050.000	Rp. 78.834.090	99,73%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 9.266.000	Rp. 9.266.000	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 69.784.000	Rp. 69.568.090	99,69%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 600.000.000	Rp. 584.184.093	97,36%

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp. 200.000.000	Rp. 199.976.008	99,99%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 400.000.000	Rp. 384.208.085	96,05%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 550.000.000	Rp. 535.954.302	97,45%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp. 200.000.000	Rp. 199.960.195	99,98%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 350.000.000	Rp. 335.994.107	96%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 2.450.000	Rp. 2.450.000	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.450.000	Rp. 2.450.000	100%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 2.450.000	Rp. 2.450.000	100%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 1.336.580.000	Rp. 1.307.815.000	97,85%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 1.336.580.000	Rp. 1.307.815.000	97,85%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp. 36.740.000	Rp. 36.740.000	100%
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Rp. 1.275.000.000	Rp. 1.246.235.000	97,74%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 24.480.000	Rp. 24.840.000	100%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 14.876.000	Rp. 14.257.000	95,84%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 14.876.000	Rp. 14.257.000	95,84%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 2.231.000	Rp. 1.995.000	89,42%
	Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 3.281.000	Rp. 3.175.000	96,77%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 1.706.000	Rp. 1.706.000	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp. 2.126.000	Rp. 2.000.000	94,07%
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegakan Batas Desa	Rp. 2.196.000	Rp. 2.045.000	93,12%
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp. 3.336.000	Rp. 3.336.000	100%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Aplikasi FMIS Kecamatan Gambut Tahun 2023

Penjelasan Tabel 3.7 sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang merupakan Sasaran Utama Kecamatan Gambut Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi dengan target 73 dapat terealisasi 77,36 dengan nilai capaian 105,97% yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp 6.878.307.434,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.407.828.686,- dengan Persentase capaian 93,16%.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.225.271.434,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.825.338.201,- dan Persentase capaian 90,53%. Program ini didukung dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.299.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.299.600,- dan Persentase capaian 100%. Dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 499.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 499.800,- dan Persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 349.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 349.000,- dan Persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 450.000,- dan Persentase capaian 100%.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.647.191.860,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.270.907.569,- dan Persentase capaian 89,68%. Dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.598.051.860,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.221.767.569,- dan Persentase capaian 89,54%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.140.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.140.000,- dan Persentase capaian 100%.

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 27.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.000.000,- dan Persentase capaian 100%. Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.000.000,- dan Persentase capaian 100%.

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 7.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar sebesar Rp. 7.200.000,- (100%) dan Persentase capaian 100%. Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.200.000,- dan Persentase capaian 100%.

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 147.593.250,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 143.461.147,- dan Persentase capaian 97,20%. Dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.495.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.495.000,- dan Persentase capaian 100%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.495.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.495.500,- dan Persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.073.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.650.000,- dan Persentase capaian 94,32%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.124.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.958.500,- dan Persentase capaian 92,21%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.995.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.995.000,- dan Persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 115.410.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 112.867.147,- dan Persentase capaian 97,80%.

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu anggaran kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 31.536.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.375.000,- dan Persentase capaian 99,49%. Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.536.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.536.000,- dan Persentase capaian 99,49%.

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 205.442.724,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 196.331.385,- dan Persentase capaian 95,56%. Dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.400.000,- dan Persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.502.724,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.374.545,- dan Persentase capaian 86,68%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 147.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 145.516.840,- dan Persentase capaian 98,66%.

1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 158.008.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 147.938.100,- dan Persentase capaian 93,63%.

Dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.770.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.526.600,- dan Persentase capaian 97,77%.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.950.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.368.500,- dan Persentase capaian 57,76%.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 84.268.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 83.043.000,- dan Persentase capaian 98,52%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pagu anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 70.080.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 58.996.000,- dan Persentase capaian 84,18%. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 29.840.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.840.000,- dan Persentase capaian 100%. Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.840.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.840.000,- dan Persentase capaian 100%.

2.2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Pagu anggaran kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebesar Rp. 40.240.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.159.000,- dan Persentase capaian 72,46%. Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.240.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.156.000,- dan Persentase capaian 72,46%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Pagu anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp. 1.229.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.198.972.485,- dan Persentase capaian 97,55%. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 79.050.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.834.090,- dan Persentase capaian 99,73. Dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 9.266.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.266.000,- dan Persentase capaian 100%.

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 69.784.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.568.090,- dan Persentase capaian 99,69%.

3.2. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebesar Rp. 1.150.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.120.138.395,- dan Persentase capaian 97,40%. Dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 399.936.203,- dan Persentase capaian 99,98%.
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 720.202.192,- dan Persentase capaian 99,69%.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pagu anggaran Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 2.450.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.450.000,- dan Persentase capaian 100%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 2.450.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.450.000,- dan Persentase capaian 100%. Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar 2.450.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.450.000,- dan Persentase capaian 100%.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Umum

Pagu anggaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 1.336.580.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.307.815.000,- dan Persentase capaian 97,85%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pagu anggaran kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp. 1.336.580.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.307.815.000,- dan Persentase capaian 97,85%. Dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.740.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.740.000,- dan Persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.275.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.246.235.000,- dan Persentase capaian 97,74%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.480.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.480.000,- dan Persentase capaian 100%.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Pagu anggaran Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sebesar Rp. 14.876.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.257.000,- dan Persentase capaian 95,84%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

6.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu anggaran kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 14.876.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.257.000,- dan Persentase capaian 95,84%.

Dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.231.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.995.000,- dan Persentase capaian 89,42%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.281.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.175.000,- dan Persentase capaian 96,77%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.706.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.706.000,- dan Persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.126.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.000.000,- dan Persentase capaian 94,07%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.196.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.045.000,- dan Persentase capaian 93,12%.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.336.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.336.000,- dan Persentase capaian 100%.

Untuk perbandingan pencapaian sasaran kinerja dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN REALISASI (%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73	77,36	105,97	6.878.307.434	6.407.828.686	93,16
1	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	73	73,42	100,57	4.225.271.434	3.825.338.201	90,53
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%	100%	100	1.299.600	1.299.600	100
3	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	91%	91	3.647.191.860	3.270.907.569	89,68
4	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	100%	100	27.000.000	27.000.000	100
5	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100%	98,03%	98,03	158.008.000	147.938.100	93,63
6	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	100%	100	7.200,00	7.200,00	100
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	147.593.250	143.461.147	97,2
8	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100%	100%	100	31.536.000	31.375.000	99,49
9	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	205.442.724	196.331.385	95,56
10	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	100%	100%	100	29.840.000	29.840.000	100
11	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	100%	100%	100	40.240.000	29.156.000	72,46
12	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	1.336.580.000	1.307.815.000	97,85
13	Meningkatnya fasilitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100	14.876.000	14.257.000	95,84
14	Meningkatnya fasilitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Persentase fasilitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	100	40.240.000	29.156.000	72,46
15	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	100	79.050.000	78.834.090	99,73
16	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Gambut)	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	600.000.000	584.184.093	97,36
17	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Gambut Barat)	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	550.000.000	535.954.302	97,45
18	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	100%	100	2.450.000	2.450.000	100

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kecamatan Gambut Tahun 2023

Penjelasan tabel 3.8 sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja sasaran strategis dengan indikator Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang merupakan Sasaran Utama Kecamatan Gambut Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi dengan target 73 dapat terealisasi 77,36 dengan nilai capaian 105,97% yang didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.878.307.434,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.407.828.686,- dengan Persentase capaian 93,16%.
2. Pencapaian kinerja Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) target 73 realisasi 73,42 dengan nilai capaian 100,57%, Indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.225.271.434,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.825.338.201,- dan Persentase capaian 90,53%.
3. Pencapaian kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dengan Indikator Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, Indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.299.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.299.600,- dan Persentase capaian sebesar 100%.
4. Pencapaian kinerja Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 91%, indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.647.191.860,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.270.907.569,- dengan Persentase capaian anggaran 89,68%.
5. Pencapaian kinerja Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersusun memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 27.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 27.000.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100%.

6. Pencapaian kinerja Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan memperoleh capaian kinerja sebesar 98,03% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 158.008.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 147.938.100,- dengan Persentase capaian anggaran 93,63%.
7. Pencapaian kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100%.
8. Pencapaian kinerja Terselenggaranya Kegiatan Kantor dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 147.593.250,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 143.461.147,- dengan Persentase capaian anggaran 97,20%.
9. Pencapaian kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 31.536.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.375.000,- dengan Persentase capaian anggaran 99,49%.
10. Pencapaian kinerja Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 205.442.724,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 196.331.385,- dengan Persentase capaian anggaran 95,56%.
11. Pencapaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indikator Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan

- anggaran sebesar Rp. 29.840.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.840.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100%.
12. Pencapaian kinerja Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 40.240.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.156.000,- dengan Persentase capaian anggaran 72,46%.
 13. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.336.580.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.307.815.000,- dengan Persentase capaian anggaran 97,85%.
 14. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan dengan indikator Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 14.876.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.257.000,- dengan Persentase capaian anggaran 95,84%.
 15. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 79.050.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 78.834.090,- dengan Persentase capaian anggaran 99,73%.
 16. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 584.184.093,- dengan Persentase capaian anggaran 97,36%.

17. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 550.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 535.954.302,- dengan Persentase capaian anggaran 97,45%.
18. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.450.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.450.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100%.

C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Dari 18 (delapan belas) sasaran strategis/program/kegiatan dengan indikator kinerja mayoritas menunjukkan pencapaian yang sama dengan 100% tetapi dengan realisasi anggaran kurang dari 100%,

Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.9 Efisien Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN (≥ 100%)	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (100%-Kol 5)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	105,97	93,16%	6,84%
1	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	100,57	90,53%	9,47%

2	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%	100%	0
3	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	100%	0
4	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	100%	0
5	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	97,2%	2,80%
6	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100%	99,49%	0,51%
7	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	95,56%	4,44%
8	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	100%	100%	0
9	Meningkatnya fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	100%	72,46%	27,54%
10	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%	99,73%	0,27%
11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut)	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%	97,36%	2,64%
12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%	97,45%	2,55%
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	100%	0
14	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	97,85%	2,15%
15	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	95,84%	4,16%

Sumber : Pengelohan Data Kecamatan Gambut

D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

D.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2023 memperoleh nilai 50,78 dengan interpretasi predikat CC (Cukup). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen yang di evaluasi. maka pada tahun 2023 direkomendasikan kepada Camat Gambut hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan monitoring target jangka menengah dalam Renstra dengan tahun berjalan;
2. Melaksanakan reviu Renstra secara berkala untuk mengetahui apakah Renstra masih relevan dengan kondisi saat ini;
3. Memperbaiki kualitas penyusunan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan data kinerja yang andal yaitu datanya valid, dapat

ditelusuri kesumber datanya, diperoleh dari sumber yang kompeten, dapat diverifikasi dan konsisten serta selaras dengan dokumen perencanaan diatasnya dan menerapkannya pada penyusunan perencanaan kinerja tahun 2024;

4. Memperbaiki kualitas Perjanjian Kinerja (PK) sampai dengan individu/staf yang dapat menggambarkan suatu tingkatan tertentu (output/outcome) yang seharusnya dicapai dan mengacu/selaras dengan tugas dan fungsi;
5. Memperbaiki kualitas Rencana Aksi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dan selaras dengan target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK), Renja, Renstra/RPJMD;
6. Melaksanakan monitoring rencana aksi secara berkala yang tidak hanya terbatas pada penyerahan atau pengumpulan data capaian kinerja, namun juga merumuskan mengenai upaya dan solusi terhadap setiap hambatan/masalah;
7. Memperbaiki kualitas penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan individu secara turunan kinerja atasannya;
8. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran Kinerja mulai dari level manajerial hingga individu / staf pelaksana, sehingga capaian atau proses kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;
9. Memanfaatkan Rencana Aksi dan target kinerja dalam rangka menyimpulkan dan menyusun tindak lanjut perbaikan dan digunakan dalam pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
10. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan data kinerja yang andal yaitu datanya valid, dapat ditelusuri kesumber datanya, diperoleh dari sumber yang kompeten, dapat diverifikasi dan konsisten sehingga dapat menggambarkan/berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan hasil-hasil capaian kinerja output dan outcome yang seharusnya tercapai serta menerapkannya pada penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023;

11. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan program atas Rencana Aksi dengan memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan dan memanfaatkan hasil pemantauan rencana aksi berupa tindak lanjut dan perbaikan dalam bentuk langkah-langkah nyata serta memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan;
12. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan hasil Analisis Evaluasi AKIP;
13. Mempublikasikan Renja, IKU, PK pada Esr Menpan dan pada Website Kecamatan Gambut sehingga memudahkan publik untuk mengakses.

D.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Kecamatan Gambut telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Menggunakan dokumen Renstra sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.
2. Perjanjian Kinerja (PK) sampai dengan individu/staf yang sudah di buat.
3. Mengukur kinerja staf dan melakukan monitoring kinerja secara periodik.
4. Menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.
5. Menyajikan analisa untuk capaian kinerja pada pemantauan rencana aksi dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi.
6. Mempublikasikan Renja, IKU, PK pada Esr Menpan dan pada Website Kecamatan Gambut.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gambut Tahun 2023, merupakan bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban pencapaian kinerja Tahun 2023, yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKJIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2024 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2023, sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan dengan target Tahun 2023 sebesar 73 dengan realisasi sebesar 77,36 dan perolehan capaian sebesar 105,97%, dengan predikat Berhasil. Pencapaian keberhasilan sasaran strategis ini di dukung oleh 18 (delapan belas) indikator kinerja lain sebagai berikut :

1. Indikator Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.
2. Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut.
3. Indikator Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD.
4. Indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
5. Indikator Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun.
6. Indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi.
7. Indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah.
8. Indikator Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah.
9. Indikator Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi.
10. Indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan.

11. Indikator Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana.
12. Indikator Persentase Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
13. Indikator Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana.
14. Indikator Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gambut yang Terlaksana.
15. Indikator Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gambut Barat yang Terlaksana.
16. Indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan.
17. Indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
18. Indikator Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan.

Tercapainya target kinerja untuk masing- masing indikator kinerja yang termuat Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya target indikator sasaran strategis Kecamatan Gambut Tahun 2023

B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan Gambut agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
2. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin oleh instansi /mitra pemangku terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pendampingan

penyusunan Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja , Tabel Keselaran guna peningkatan nilai SAKIP.

3. Pelaksanaan Koordinasi yang lebih intens lagi baik itu pada internal kecamatan Gambut maupun dengan pihak diluar Kecamatan Gambut

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gambut ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Gambut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2023 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Pencapaian target- target perencanaan pada tahun berikutnya

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gambut Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Gambut Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN GAMBUT

Alamat : Jl. Jend. A. Yani KM. 14.800 Gambut 70652

Website : <https://kec-gambut.banjarkab.go.id> Email : kec.gambut@banjarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Martapura perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Gambut;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor; 5. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan	: KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN GAMBUT
KESATU	: Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
KEDUA	: Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
KETIGA	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gambut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Gambut Kabupaten Banjar ini.
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di GAMBUT
pada tanggal 03 JANUARI 2023

CAMAT GAMBUT

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

Lampiran I : Keputusan Camat Gambut
 Nomor : 12 Tahun 2023
 Tanggal : 03 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 CAMAT GAMBUT
 TAHUN 2023

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara.	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang (Rujukan : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat)	Camat	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek	Camat	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

				Pemberdayaan Masyarakat.		
--	--	--	--	-----------------------------	--	--

CAMAT GAMBUT

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si

Pembina / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

Lampiran II : Keputusan Camat Gambut
 Nomor : 12 Tahun 2023
 Tanggal : 03 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (LEVEL PROGRAM)
 KECAMATAN GAMBUT
 TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan	Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Kecamatan merupakan salah satu instrumen untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan system pengendalian intern di Kecamatan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = \sum (Unsur kinerja utama x 40%) + (Unsur kepatuhan x 30%) + (Unsur Pelayanan Umum x 30 %)	SEKRETARIS CAMAT	Hasil Penilaian Mandiri IKKI
2.	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana : Total Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Gambut
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Gambut
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Gambut

	ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana		
5.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Gambut
6.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana : Total Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Gambut

CAMAT GAMBUT

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si

Pembina / IV.a

NIP. 19801125 200012 1 003

Lampiran II : Keputusan Camat Gambut
 Nomor : 12 Tahun 2023
 Tanggal : 03 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (LEVEL KEGIATAN)
 KECAMATAN GAMBUT
 TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terfasilitasi		Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terfasilitasi : Total Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terfasilitasi	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Gambut
2.	Terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana : Total Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Gambut
3.	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Gambut

4.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana : Total Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Gambut
5.	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi		Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi : Total jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Gambut
6.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Yang Terlaksana : Total Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Yang Terlaksana	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Gambut
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana : Total Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Gambut

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	<p>Dokumen perencanaan terdiri dari : Dokumen Renja Murni, Dokumen Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja (PK) Murni, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan, RKT Murni, RKT Perubahan, Rencana Aksi, Tabel Keselarasan</p> <p>Dokumen penganggaran terdiri dari : RKA Murni, RKA Perubahan, DPA Murni, DPA Perubahan.</p> <p>Dokumen evaluasi terdiri dari : Laporan Renja dan Laporan Fisik dan Keuangan Bulanan.</p> <p>Dokumen pelaporan kinerja : LKJIP, LKPJ</p> <p>Yang dimaksud tepat waktu adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas dapat diselesaikan penyusunannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.</p> <p>Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan : bahwa dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut di atas mengacu dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis dokumen yang disusun.</p>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan dibagi Jumlah target dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan dikali 100%	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kecamatan Gambut
--	--	--	---	--	--

	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD terdiri dari : 1. Uang Persediaan (UP) 2. Ganti Uang (GU), 3. Langsung (LS), 4. Tambah Uang (TU)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang terlaksana dibagi Jumlah target dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dikali 100%	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Terlaksananya dokumen pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu			KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi			KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan			KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan			KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	
	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran			KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

CAMAT GAMBUT

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si

Pembina / IV.a

NIP. 19801125 200012 1 003



**PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

TAHUN 2023

**KECAMATAN GAMBUT
KABUPATEN BANJAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD FAUZAN, S.STP, M. Si
Jabatan : CAMAT GAMBUT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SAIDI MANSYUR, S.IKom
Jabatan : BUPATI BANJAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BANJAR,

Pihak Pertama,
CAMAT GAMBUT
KABUPATEN BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.Ikom

AHMAD FAUZAN, S.STP, M. Si
Pembina
NIP. 19801125 200012 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN GAMBUT**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.225.271.434,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	70.080.000,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.229.050.000,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.450.000,-
5.	Proram Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	1.336.580.000,-
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	14.876.000,-
	Jumlah	6.878.307.434,-

Martapura, Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BANJAR,

Pihak Pertama,
CAMAT GAMBUT
KABUPATEN BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.IKom

AHMAD FAUZAN, S.STP, M. Si
Pembina
NIP. 19801125 200012 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI WAHYUNINGSIH, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
Jabatan : Camat Gambut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
CAMAT GAMBUT

Gambut, Oktober 2023
Pihak Pertama,
SEKRETARIS CAMAT

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

SRI WAHYUNINGSIH, S.Sos
PEMBINA / IV.a
NIP. 19710512 200604 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KECAMATAN GAMBUT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	73

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 4.225.271.434
Jumlah		Rp 4.225.271.434

Pihak Kedua,
CAMAT GAMBUT

Gambut, Oktober 2023

Pihak Pertama,
SEKRETARIS CAMAT

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

SRI WAHYUNINGSIH, S.Sos
PEMBINA / IV.a
NIP. 19710512 200604 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANTI, S.Kom
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI WAHYUNINGSIH, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS CAMAT

Gambut, Oktober 2023
Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SRI WAHYUNINGSIH, S.Sos
PEMBINA / IV.a
NIP. 19710512 200604 2 004

YULIANTI, S.Kom
PENATA MUDA TK.I / III.b
NIP. 19770710 201101 2 008

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN GAMBUT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	100%
2	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
3	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
4	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 7.200.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 147.593.250
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 31.536.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 205.442.724
Jumlah		Rp. 391.771.974

Gambut, Oktober 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS CAMAT

Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SRI WAHYUNINGSIH, S.Sos
PEMBINA / IV.a
NIP. 19710512 200604 2 004

YULIANTI, S.Kom
PENATA MUDA TK.I / III.b
NIP. 19770710 201101 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAKA UMBARA, A.Md
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI WAHYUNINGSIH, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS CAMAT

Gambut, Oktober 2023
Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN ASET

SRI WAHYUNINGSIH, S.Sos
PEMBINA / IV.a
NIP. 19710512 200604 2 004

JAKA UMBARA, A.Md
PENATA MUDA TK.I / III.b
NIP. 19800801 200501 1 016

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
KECAMATAN GAMBUT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%
2	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100%
4	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.299.600
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.647.191.860
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 27.000.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 158.008.000
Jumlah		Rp. 3.833.499.460

Pihak Kedua,
SEKRETARIS CAMAT

Gambut, Oktober 2023
Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN ASET

SRI WAHYUNINGSIH, S.Sos
PEMBINA / IV.a
NIP. 19710512 200604 2 004

JAKA UMBARA, A.Md
PENATA MUDA TK.I / III.b
NIP. 19800801 200501 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERMA MAULIDA, S.Sos. I
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
Jabatan : Camat Gambut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
CAMAT GAMBUT

Gambut, Oktober 2023
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
SOSIAL

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

ERMA MAULIDA, S.Sos. I
PENATA TK.I / III.d
NIP. 19800210 201001 2 002

PERJANJIAN KINERJA
SEKSI KESEJAHTERTAAN SOSIAL KECAMATAN GAMBUT
TAHUN 2023

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 29.840.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
Jumlah		Rp. 29.840.000

Pihak Kedua,
CAMAT GAMBUT

Gambut, Oktober 2023
Pihak Pertama,
**KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
SOSIAL**

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

ERMA MAULIDA, S.Sos. I
PENATA TK.I / III.d
NIP. 19800210 201001 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SYAHRANI
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
Jabatan : Camat Gambut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
CAMAT GAMBUT

Gambut, Oktober 2023
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

Ir. SYAHRANI
PENATA TK. I / III.d
NIP: 19660813 199703 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN GAMBUT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Persentase fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
3	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%

No	Program / Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 40.240.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 1.336.580.000
3	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 14.876.000
Jumlah		Rp. 1.391.696.000

Pihak Kedua,
CAMAT GAMBUT

Gambut, Oktober 2023
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

Ir. SYAHRANI
PENATA TK. I / III.d
NIP: 19660813 199703 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HIDAYAT, S.Pd. M.Pd
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
Jabatan : Camat Gambut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gambut, Oktober 2023

Pihak Kedua,
CAMAT GAMBUT

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

HIDAYAT, S.Pd. M.Pd
PEMBINA / IV.a
NIP. 19670404 199303 1 018

**PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN GAMBUT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%

No	Program / Kegiatan	Anggaran
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 79.050.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
Jumlah		Rp. 79.050.000

Pihak Kedua,
CAMAT GAMBUT

Gambut, Oktober 2023
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

HIDAYAT, S.Pd. M.Pd
PEMBINA / IV.a
NIP. 19670404 199303 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD SYAUKANI. SE
Jabatan : Lurah Gambut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
Jabatan : Camat Gambut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak Kedua,
CAMAT GAMBUT

Gambut, Oktober 2023
Pihak Pertama,
LURAH GAMBUT

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

AKHMAD SYAUKANI. SE
PENATA TK. I / III.c
NIP: 19840902 200501 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
KELURAHAN GAMBUT KECAMATAN GAMBUT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan sesuai dengan ketentuan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%

No	Program / Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 600.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
Jumlah		Rp. 600.000.000

Pihak Kedua,
CAMAT GAMBUT

Gambut, Oktober 2023

Pihak Pertama,
LURAH GAMBUT

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

AKHMAD SYAUKANI. SE
PENATA TK. I / III.c
NIP: 19840902 200501 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IWAN TARUNA, S.Hut, M.Si
Jabatan : Lurah Gambut Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
Jabatan : Camat Gambut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak Kedua,
CAMAT GAMBUT

Gambut, Oktober 2023
Pihak Pertama,
LURAH GAMBUT BARAT

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

IWAN TARUNA, S.Hut, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP: 19730607 200003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
KELURAHAN GAMBUT BARAT KECAMATAN GAMBUT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan sesuai dengan ketentuan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%

No	Program	Anggaran
1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 550.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
Jumlah		Rp. 550.000.000

Pihak Kedua,
CAMAT GAMBUT

Gambut, Oktober 2023

Pihak Pertama,
LURAH GAMBUT BARAT

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

IWAN TARUNA, S.Hut, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP: 19730607 200003 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZURKANI, S. Sos
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
Jabatan : Camat Gambut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
CAMAT GAMBUT

Gambut, Oktober 2023
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

ZURKANI, S. Sos
PENATA TK.I / III.d
NIP. 19740814 200904 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KECAMATAN GAMBUT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100%

No	Program	Anggaran	
1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	2.450.000
Jumlah		Rp.	2.450.000

CAMAT GAMBUT

Gambut, Oktober 2023
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN

AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

ZURKANI, S. Sos
PENATA TK.I / III.d
NIP. 19740814 200904 1 002